**THE CONCEPT OF LAW ENFORCEMENT AGAINT CRIMINAL ACTS OF ILLICIT NARCOTICS TRAFFICKING COMMITTED ORGANIZEDLY IN INDONESIA**

Hezron Sabar Rotua Tinambunan\*1,Istislam2, Shinta Hadiyantina3, Adi Kusumaningrum

1Doctor of Law Program, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, Indonesia, hezrontinambunan@unesa.ac.id

2Doctor of Law Program, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, Indonesia, ist@ub.ac.id

3Doctor of Law Program, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, Indonesia, shinta\_fh@ub.ac.id

4Doctor of Law Program, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, Indonesia, [adi\_ningrum@ub.ac.id](mailto:adi_ningrum@ub.ac.id)

**PENDAHULUAN**

Secara internal, letak geografis Indonesia yang strategis dan statusnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang besar menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial peredaran gelap Narkotika. Letak geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau menjadikannya tempat yang menarik bagi penyelundupan Narkotika. Luasnya wilayah laut membuat aparat penegak hukum kesulitan memantau seluruh jalur masuk yang mungkin dilalui sindikat Narkotika. Beberapa negara tetangga Indonesia juga merupakan produsen Narkotika seperti sabu dan ganja. Hal ini memungkinkan terjadinya peredaran Narkotika dari luar negeri ke Indonesia dan sebaliknya, serta memudahkan pergerakan sindikat Narkotika internasional. Akibatnya, penggunaan Narkotika pun meningkat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus penyalahgunaan Narkotika dan Narkoba yang dilaporkan di Indonesia pada tahun 2022 adalah sebanyak 851 kasus. Jumlah ini meningkat sebesar 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 766 kasus. Sebaliknya, pada tahun sebelumnya, terdapat 1.350 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Narkoba. Angka ini meningkat 14,02% dibandingkan tahun sebelumnya, 2021, yang berjumlah 1.184 orang. Pada tahun 2022, BNN juga berhasil menangkap 49 jaringan Narkoba yang beroperasi di Indonesia. Terdiri dari dua puluh enam jaringan nasional dan dua puluh tiga jaringan internasional. Selain itu, sebagai bukti lebih lanjut, BNN berhasil menyita 1.904 ton sabu. Barang bukti ganja yang disita sebanyak 1,06 ton. Barang bukti saat itu sebanyak 262.789 butir ekstasi. Setahun lalu, ditemukan barang bukti Narkoba berupa bubuk ekstasi seberat 16,5 kilogram. Selain itu, sebanyak 152,6 ton Narkoba jenis ganja basah dan 63,9 hektare (ha) lahan ganja dimusnahkan BNN.

Meskipun penyalahgunaan Narkoba dulunya sebagian besar dikaitkan dengan kelompok tertentu seperti selebritas, musisi, dan individu kaya dalam beberapa dekade terakhir, kini penyalahgunaan Narkoba mencakup berbagai demografi, termasuk mereka yang tidak berpendidikan dan berpendidikan, serta individu yang memegang posisi berwenang. Fenomena ini muncul karena banyaknya jenis obat yang tersedia di pasaran, yang mencakup obat-obatan kelas atas yang hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat kaya atau selebriti tertentu, serta alternatif yang lebih terjangkau yang dapat diakses oleh individu dengan status sosial ekonomi rendah.

Sejarah manusia memang telah lama mengenal dan menggunakan bahan-bahan alami yang mempunyai efek memabukkan dan halusinogen. Pemanfaatan tumbuhan ini mencerminkan sejarah umat manusia dalam mencari pengalaman baru dan eksplorasi senyawa alami. Namun penggunaan zat-zat tersebut secara berlebihan dan tidak terkontrol juga menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan sosial. Beberapa di antaranya telah digunakan sepanjang sejarah manusia, sehingga menciptakan warisan panjang penggunaan zat-zat ini. Terdapat sekitar 4.000 jenis tumbuhan yang mengandung zat psikoaktif dan tidak kurang dari enam puluh jenis telah dikonsumsi sepanjang sejarah manusia. Dari jenis yang paling banyak dimanfaatkan adalah candu dari bunga *poppy* (*papaver somniferum*), bunga, daun dan damar dari tanaman ganja (*cannabis sativa*) dan daun tanaman *coca* (*erythoxylum*). Data awal ketiga tanaman obat ini tersebar pada abad ke-3 SM.

Ada faktor yang mempengaruhi secara langsung dan ada pula faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung namun mempunyai peranan yang kuat dalam menciptakan kondisi yang memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Faktor-faktor yang termasuk dalam kategori pertama yang mempengaruhi penyalahgunaan Narkoba antara lain sebagai berikut. Bahwa peredaran atau peredaran Narkoba adalah bisnis besar yang bisa menghasilkan uang dengan cepat. Adanya efek ketergantungan (kecanduan) pada pengguna Narkoba sehingga jika seseorang mulai menyalahgunakan Narkoba maka ia akan menggunakannya secara terus menerus.

Indonesia saat ini telah masuk dalam sindikat jaringan peredaran gelap Narkoba yang berasal dari Segitiga Emas, Bulan Sabit Emas, dan Amerika Latin. Kemudian faktor tersebut termasuk dalam kategori kedua. Pertama, letak geografis Indonesia, selain berada di persimpangan jalan, juga terdiri dari ribuan pulau dan banyak pelabuhan sehingga sulit dilakukan pemantauan secara intens. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menguntungkan para pengedar, namun menyulitkan pendeteksian oleh aparat keamanan. Hal lainnya menyangkut penegakan hukum, agama, pendidikan, dan kebudayaan.

Distribusi ini melibatkan pergerakan besar-besaran Narkotika melalui berbagai jalur, pada umumnya melibatkan *organized crime groups* atau kelompok kejahatan terorganisir. Akhirnya, Narkotika yang telah didistribusikan mencapai konsumen akhir yang menyalahgunakannya. Inilah tahap yang memiliki dampak negatif pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Angkatan Kepolisian Kerajaan Kanada sebagaimana dikutip James R. Richards, ada 14 (empat belas) karakteristik yang dimiliki oleh kelompok kejahatan terorganisir, yakni:

1. Korupsi: penggunaan pengaruh terlarang, eksploitasi kelemahan, dan pemerasan terhadap tokoh masyarakat dan tokoh terkemuka.
2. Disiplin: menegakkan ketaatan pada organisasi melalui rasa takut dan kekerasan.
3. Infiltrasi: upaya berkelanjutan untuk mendapatkan pijakan di lembaga-lembaga yang sah untuk mendapatkan keuntungan lebih lanjut atau mendapatkan perlindungan dari deteksi.
4. Isolasi: perlindungan pemimpin organisasi dengan memisahkan mereka dari tentara, sel dari sel, dan fungsi dari fungsi.
5. Monopoli: penguasaan terhadap kegiatan kriminal tertentu dalam suatu wilayah geografis tanpa toleransi terhadap persaingan.
6. Motivasi: satu-satunya motivasi adalah kekuasaan dan pengaruh yang dihasilkan dari akumulasi kekayaan (motivasi ini membedakan kelompok kriminal terorganisir dengan teroris, yang dimotivasi oleh keuntungan politik atau sosial).
7. Subversi: melawan institusi masyarakat dan sistem nilai hukum dan moral.
8. Sejarah: memungkinkan konfirmasi dan penyempurnaan kegiatan dan praktik kriminal.
9. Kekerasan: digunakan tanpa ragu-ragu untuk mencapai tujuan kriminal organisasi.
10. Kecanggihan: dalam penggunaan sistem komunikasi, pengendalian keuangan dan operasi yang canggih.
11. Kontinuitas: seperti sebuah korporasi, sebuah organisasi dapat bertahan hidup berkat individu-individu yang menciptakan dan menjalankannya.
12. Keberagaman: dalam aktivitas terlarang, untuk semakin mengisolasi organisasi dari ketergantungan pada satu aktivitas kriminal.
13. Ikatan: individu dengan individu, dan individu dengan organisasi, untuk solidaritas dan perlindungan, seringkali melalui upacara inisiasi yang rumit.
14. Mobilitas: pengabaian batas negara dan yurisdiksi.

Kejahatan terorganisir dan perdagangan Narkotika saling terkait dan seringkali berjalan beriringan. Kejahatan terorganisir seringkali menjadi pendorong utama peredaran Narkotika ilegal. Mereka memanfaatkan struktur hierarki dan jaringan yang kuat untuk mengendalikan produksi, distribusi, dan penjualan Narkotika. Selain itu, peredaran Narkotika merupakan sumber pendapatan yang sangat menguntungkan bagi kelompok kejahatan terorganisir. Dalam konteks ini, kelompok kejahatan terorganisir seringkali berperan dalam memasok Narkotika ke pasar gelap, mengkoordinasikan transportasi lintas batas negara, bahkan terlibat dalam pencucian uang hasil penjualan Narkotika.

Kelompok kejahatan terorganisir menjalankan operasi mereka dengan cara yang mirip dengan bisnis legal, dengan fokus pada aspek kewirausahaan dalam dunia kejahatan. Kelompok kejahatan terorganisir menggunakan strategi bisnis untuk mengendalikan berbagai sektor ilegal, seperti peredaran Narkotika, perdagangan manusia, pencucian uang, dan lainnya. Kejahatan terorganisir seringkali memiliki struktur hierarki yang terorganisir dengan jelas, seperti perusahaan. Mereka memiliki pemimpin, manajer, dan anggota yang memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dalam organisasi. Seperti halnya pelaku usaha legal, kejahatan terorganisir juga berinovasi dan mendiversifikasi operasinya. Mereka mencoba berbagai jenis kegiatan ilegal dan terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan hukum dan ekonomi. Mereka juga menganalisis bagaimana penegakan hukum dan lembaga keamanan dapat merespons melalui strategi penindakan yang digunakan untuk memerangi bisnis ilegal mereka. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan tidak ada satu pun kabupaten/kota di Indonesia yang bebas dari permasalahan Narkoba.

Peredaran Narkoba pada umumnya dilakukan secara terorganisir, yang menjalankan perdagangan Narkoba secara terstruktur dan terkoordinasi. Dalam konteks ini, kejahatan terorganisir melibatkan jaringan yang memiliki struktur hierarki yang terdiri dari berbagai tingkat peran, seperti produsen, distributor, dealer, dan pengepul. Mereka beroperasi di tingkat lokal, nasional atau bahkan internasional, mengimpor dan mendistribusikan Narkotika ke pasar yang berbeda. Salah satu ciri utama perdagangan Narkoba yang dikendalikan oleh kejahatan terorganisir adalah skala operasinya yang besar. Keuntungan yang besar menjadi motivasi utama kejahatan terorganisir yang seringkali juga melibatkan praktik ilegal lainnya seperti penggunaan kekerasan, penyuapan, perdagangan orang, pencucian uang dan bahkan pendanaan terorisme.

Kejahatan Narkotika yang terorganisir saat ini tidak lagi hanya menjadi permasalahan dalam negeri sebuah negara saja, namun sudah menjadi permasalahan internasional. Saat ini, *Organized Crime Group* muncul di banyak negara secara bersamaan untuk mengeksploitasi pasar kriminal dan pasar sah global. 'Ndrangheta adalah contoh dari evolusi ini. Klan 'Ndrangheta yang asli muncul di Calabria (wilayah di Italia) pada akhir tahun 1800-an. Hingga tahun 1970-an, 'Ndrangheta jarang beroperasi di luar Calabria. Namun pada tahun 1990an, 'Ndrangheta mencari peluang baru di pasar global. Misalnya, 'Ndrangheta mulai menandatangani kontrak dengan organisasi penyelundup Narkoba Kolombia pada tahun 1990an, mengimpor kokain untuk pasar Eropa yang sedang berkembang. Saat ini, 'Ndrangheta memiliki kehadiran yang signifikan di lebih dari selusin negara, dimulai di Australia dan Kanada.

Perbedaan paling jelas antara kejahatan terorganisir dan bentuk kejahatan lainnya adalah bahwa kejahatan tersebut “terorganisir.” Secara umum, tidak termasuk tindak pidana perseorangan yang dilakukan secara asal-asalan, tanpa perencanaan. Sebaliknya, pendekatan ini berfokus secara eksklusif pada tindakan terencana dan rasional yang mencerminkan upaya sekelompok individu. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mendapatkan elemen-elemen umum untuk menggambarkan dan mendefinisikan kejahatan terorganisir secara lebih spesifik. Daftar semua kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir akan dengan cepat menjadi ketinggalan jaman karena perubahan sosial, politik dan teknologi mengakibatkan perubahan peluang kejahatan di berbagai lokasi. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mendefinisikan Kejahatan terorganisir sebagai suatu usaha kriminal berkelanjutan yang secara rasional berupaya untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan-kegiatan terlarang yang sering kali banyak diminati oleh masyarakat. Keberadaannya dipertahankan melalui korupsi pejabat publik dan penggunaan intimidasi, ancaman atau kekerasan untuk melindungi operasinya.

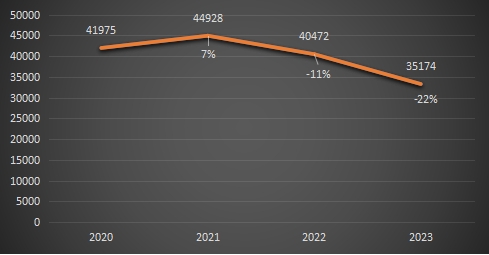
Sita Hidriyah menjelaskan bahwa dalam perspektif kelompok kejahatan terorganisir atau *Organized Criminal Group* (OCG), Indonesia dianggap sebagai pasar penting dalam peredaran Narkotika. Hal ini disebabkan karena Indonesia adalah negara dengan populasi yang sangat besar, dan hal ini menciptakan permintaan potensial yang signifikan untuk Narkotika. Dengan jumlah penduduk yang besar, pasar Narkotika di Indonesia menjadi menarik bagi OCG yang mencari pelanggan potensial. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang berperan dalam peredaran Narkotika internasional, terutama dalam pengiriman Narkotika. Sindikat Narkotika internasional sering memanfaatkan Indonesia dalam jalur distribusi Narkotika. Dalam konteks ini, OCG sering beroperasi di Indonesia untuk memenuhi permintaan Narkotika dan mendapatkan keuntungan finansial yang besar.

Mengembangkan strategi penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk memerangi peredaran Narkotika yang dilakukan oleh kejahatan terorganisir. Ini karena kejahatan terorganisir memiliki sumber daya, koordinasi, dan fleksibilitas yang signifikan dalam menjalankan bisnis Narkotika mereka. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu mengambil tindakan konkret. Dalam rangka memerangi peredaran Narkotika yang dilakukan oleh kejahatan terorganisir, strategi penegakan hukum harus dinamis, beradaptasi, dan berkolaborasi. Ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah keamanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penegakan hukum bertujuan untuk mengurangi ketersediaan Narkotika di pasaran dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya dengan membongkar struktur kriminal terorganisir yang terlibat dalam peredaran Narkotika.

Berdasarkan data dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan R.I, jumlah SPDP atau Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang masuk pada tahun 2022 sebanyak 40.472 perkara. Jumlah ini sedikit menurun dibandingkan dengan SPDP tahun 2021 sebanyak 44.928 perkara. Sementara sampai bulan Oktober tahun 2023, sudah masuk sebanyak 35.174 perkara.

Tabel 1.1

Grafik SPDP Narkotika



*Sumber*: *Direktorat Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Jampidum Kejaksaan Agung*

Dari jumlah 40.472 perkara yang masuk pada tahun 2022 tersebut, hanya ada 27 perkara yang dikaitkan oleh penyidik dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010) dan hanya 43 perkara yang dikaitkan dengan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009). Sementara dari 35.174 perkara yang masuk sampai dengan bulan Oktober 2023, hanya ada 26 perkara yang dikaitkan oleh penyidik dengan UU No. 8 Tahun 2010 dan 42 perkara yang dikaitkan dengan Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009. Apabila dibandingkan, hanya 0,17 persen dari keseluruhan perkara pada tahun 2022 yang dikaitkan oleh penyidik dengan UU No. 8 Tahun 2010 dan Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009. Sementara sampai dengan bulan Oktober 2023, hanya 0,19 persen saja yang dikaitkan oleh penyidik dengan UU No. 8 Tahun 2010 dan Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009.

Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 sendiri mengatur bahwa:

“Setiap orang yang:

1. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
2. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 bersifat *lex specialis* atas *predicate crime* yang berasal dari Narkotika. Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 kemudian memberikan kewenangan bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kejahatan mengenai hasil kejahatan tindak pidana Narkotika dan/atau prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau prekursor Narkotika. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 berbeda dengan ketentuan sebagaimana dalam UU No. 8 Tahun 2010. Perbedaan tersebut terlihat pada unsur-unsurnya hingga penerapannya. Pengaturan dalam UU No. 8 Tahun 2010 memiliki unsur yang lebih luas daripada Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009.

Adapun Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 merupakan suatu ketentuan pidana mengenai hasil kejahatan Narkotika dan/atau prekursor Narkotika sebagaimana pengaturan hasil kejahatan pada umumnya dan bukan mengenai pencucian uang khusus Narkotika dan/atau prekursor Narkotika. Pengaturan yang merupakan pencucian uang merupakan pengaturan sebagaimana dalam UU No. 8 Tahun 2010, sedangkan Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 merupakan suatu ketentuan pidana mengenai hasil kejahatan Narkotika dan/atau prekursor Narkotika sebagaimana pengaturan hasil kejahatan pada umumnya dan bukan mengenai pencucian uang khusus Narkotika dan/atau prekursor Narkotika. Kemudian, untuk dapat dikatakan sebagai pencucian uang terdapat 3 tahap perbuatan yang harus terpenuhi, yaitu *Placement*, *Layering*, dan *Integration*. Jika salah satu dari 3 tahap tersebut tidak terpenuhi, maka kejahatan yang dilakukan bukan merupakan pencucian uang tetapi merupakan kejahatan mengenai hasil kejahatan. Jika merupakan kejahatan mengenai hasil kejahatan, maka pengaturan yang diterapkan adalah pengaturan sebagaimana Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009.

Dengan demikian, penerapan UU No. 8 Tahun 2010 dan Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika. Kepolisian dan BNN seharusnya menggunakan alat analisis keuangan untuk melacak transaksi keuangan yang terkait dengan tindak pidana Narkotika. Kegiatan ini melibatkan pemantauan rekening bank, transfer dana, pembelian properti, dan transaksi keuangan lainnya yang dapat menunjukkan adanya aliran uang yang tidak sah.

Belum optimalnya pemberantasan peredaran gelap Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dapat dilihat dalam contoh kasus berikut ini:

1. Perkara atas nama Togiman alias Toni alias Toge. Pada tahun 2016, Togiman alias Toni alias Toge kembali ditangkap BNN di Medan dengan barang bukti 21.425 kg sabu dan 44.849 ekstasi. Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2346/Pid.Sus/2016/PN.Mdn Tahun 2016, Togiman alias Toni alias Toge divonis hukuman penjara seumur hidup. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PT.MDN tetap menyatakan Togiman alias Toni alias Toge bersalah dan menjatuhkan hukuman mati. Togiman alias Toni alias Toge kemudian kembali ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) karena menguasai jaringannya dari Lapas Tanjung Gusta, Medan. Meski mendekam di penjara, Togiman alias Toni alias Toge masih leluasa memesan sabu, bahkan dari jaringan internasional. Dari jaringannya, petugas menyita 25 kilogram sabu. Jaringan Togiman alias Toni alias Toge menyelundupkan sabu menggunakan kotak ikan. Dalam perkara ini, Penuntut Umum mendakwa Togiman alias Toni alias Toge hanya dengan dakwaan alternatif saja, yakni melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 atau Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Dalam kasus ini, aparat penegak hukum tidak tuntas menelusuri aliran dana atau hasil kejahatan, yang dapat dilihat dari penerapan pasal terhadap Togiman alias Toni alias Toge. Dalam kasus ini, Togiman alias Toni alias Toge sebenarnya sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Lubuk Pakam namun dapat mengorganisir pengiriman Narkotika. Dari dalam Lapas, Togiman alias Toni alias Toge dengan bebas dapat berkomunikasi dengan pihak-pihak lain di luar Lapas. Aliran dana maupun dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam kasus ini tidak pernah ditelusuri. Sampai dengan saat ini, pelaksanaan eksekusi hukuman mati kepada Togiman alias Toni alias Toge masih belum dilakukan.
2. Perkara atas nama Wong Chi Ping alias Surya Wijaya. Kasus ini bermula ketika pada tahun 2014 Wong Chi Ping alias Surya Wijaya diberitahu oleh seseorang asal Hong Kong bernama Ahyi bahwa ada adalah kiriman sabu seberat 800 kg dari Filipina. Pada tahun 2015, Kapal yang disewa Wong Chi Ping alias Surya Wijaya berangkat dari Jakarta menuju Pulau Pramuka. Sabu seberat 800 kg dipindahkan ke kapal Wong Chi Ping alias Surya Wijaya. Setelah proses transaksi selesai, kapal Wong Chi Ping alias Surya Wijaya kembali ke Jakarta. Terakhir, kapal bersandar di dermaga Dadap, Tangerang dan langsung dipindahkan ke mobil untuk dihitung di darat. Selanjutnya, Wong Chi Ping alias Surya Wijaya memerintahkan mobil yang membawa sabu tersebut segera menuju pusat perbelanjaan di kawasan Taman Surya, Kalideres, yang kemudian ditangkap petugas BNN. Wong Chi Ping alias Surya Wijaya, gembong Narkoba asal Hong Kong, kemudian divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2015 melalui putusan Nomor: 1094/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt. Wong Chi Ping alias Surya Wijaya sebelumnya didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Subsidair Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Mahkamah Agung (MA) kemudian menolak permohonan kasasi Wong Chi Ping alias Surya Wijaya melalui putusan Nomor: 706K/Pid.Sus/2016. Dalam kasus ini, penegakan hukum masih belum maksimal dalam memberantas organisasi Narkotika karena tidak menelusuri aliran dana Wong Chi Ping alias Surya Wijaya kepada pihak-pihak yang terlibat atau menggunakan instrumen hukum anti pencucian uang terhadap Wong Chi Ping alias Surya Wijaya. Eksekusi terhadap Wong Chi Ping alias Surya Wijaya hingga saat ini belum terlaksana
3. Perkara atas nama Aryo Kiswanto alias Dani bin Agus Sunaryo dan Jufriadi Abdullah Ini adalah 2 kasus yang berbeda namun menarik untuk dibahas karena pada putusan pengadilan tingkat pertama, kedua terpidana tersebut dijatuhi hukuman mati. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Aryo Kiswanto alias Dani bin Agus Sunaryo dijatuhi hukuman mati melalui Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim, sedangkan Jufriadi Abdullah dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biereun melalui putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2022/PN.Bir. Hukuman mati tersebut kemudian diubah menjadi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 739 K/Pid.Sus/2023 terhadap Aryo Kiswanto alias Dani bin Agus Sunaryo, dan putusan Nomor: 363 PK/Pid.Sus/2023 terhadap Jufriadi Abdullah. Kedua terpidana tersebut sebelumnya didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 atau Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009. Baik terhadap Aryo Kiswanto alias Dani bin Agus Sunaryo maupun Jufriadi Abdullah, penyidik ternyata juga tidak menerapkan pasal-pasal yang dapat merampas aset hasil kejahatan mereka maupun menelusuri aliran-aliran dana kepada para pihak yang terlibat dalam kejahatan peredaran Narkotika yang terorganisasi ini;
4. Kartel Sinaloa (Mexico). Salah satu kartel Narkotika paling kuat di dunia. Mereka dikenal karena peran besar mereka dalam perdagangan Narkotika, terutama kokain, ke Amerika Serikat dan negara-negara lain. Salah satu pemimpinnya, Joaquín "El Chapo" Guzmán, adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam dunia Narkotika.
5. Kartel Medellín (Kolombia). Dipimpin oleh Pablo Escobar, adalah salah satu kartel kokain paling berpengaruh dalam sejarah. Mereka berperan besar dalam produksi dan distribusi kokain ke seluruh dunia.
6. Kartel Boko Haram (Afrika Barat). Boko Haram adalah kelompok teroris di Afrika Barat yang juga terlibat dalam perdagangan Narkotika sebagai sumber pendanaan mereka. Mereka terlibat dalam produksi dan penyelundupan Narkotika di kawasan tersebut;
7. Freddy Budiman, merupakan contoh yang relevan dalam konteks *organized crime* di bidang perdagangan Narkotika di Indonesia. Freddy Budiman dikenal sebagai seorang bandar Narkotika yang memiliki jaringan yang cukup terorganisir. Dalam konteks *organized crime*, penting untuk memahami bagaimana struktur organisasi ini bekerja, termasuk tingkat kepemimpinan, bagaimana jaringan distribusi dibangun, dan bagaimana peran individu dalam jaringan ini terkoordinasi. Kasus ini mencerminkan karakter lintas batas perdagangan Narkotika. Freddy Budiman terlibat dalam penyelundupan Narkotika dari luar negeri ke Indonesia. Ini menunjukkan aspek transnasional dalam *organized crime*, di mana kejahatan tersebut melibatkan kerjasama lintas negara

Indonesia sebenarnya sudah memiliki undang-undang yang mendukung penegakan hukum dalam memerangi peredaran Narkotika. Undang-undang yang melarang perbuatan peredaran Narkotika di Indonesia adalah UU No. 35 Tahun 2009. Undang-undang merupakan dasar hukum penegakan hukum terhadap peredaran, produksi, dan penggunaan Narkotika ilegal. Beberapa poin penting dalam UU No. 35 Tahun 2009 diantaranya adalah:

1. Penindakan

Undang-undang ini memberikan wewenang kepada lembaga penegak hukum untuk menyelidiki, menangkap, dan mengadili individu yang terlibat dalam peredaran Narkotika.

1. Sanksi

Undang-undang ini memberikan sanksi berat, termasuk hukuman mati bagi pelaku peredaran Narkotika tertentu yang diharapkan dapat menciptakan efek jera yang tinggi.

1. Kerjasama Internasional

Undang-undang ini juga mendukung kerjasama internasional dalam penanggulangan peredaran Narkotika, termasuk berbagi informasi intelijen dan kerja sama dalam penyidikan lintas negara.

1. Rehabilitasi dan Pencegahan

Selain penindakan, undang-undang ini juga mengakui pentingnya rehabilitasi bagi pengguna Narkotika dan upaya pencegahan agar masyarakat tidak terjerumus dalam penggunaan Narkotika.

Efektivitas penegakan hukum Narkotika melalui UU No. 35 Tahun 2009 di Indonesia kemudian menjadi subjek perdebatan karena jumlah pengguna Narkotika yang semakin meningkat. Berdasarkan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 oleh Badan Narkotika Nasional, angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika meningkat dari 1,80 persen pada tahun 2019 menjadi 1,95 persen di tahun 2021 atau naik 0,15 persen. Jika dikonversikan, jumlah penyalahgunaan Narkoba di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 3,6 juta jiwa. Ini menunjukkan bahwa program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dilaksanakan saat ini tidak berjalan dengan optimal.

Instrumen penting lainnya dalam upaya penegakan hukum peredaran Narkotika adalah *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, yang juga dikenal sebagai Protokol Palermo. Konsensus negara-negara anggota PBB ini memiliki beberapa ketentuan yang relevan terkait dengan penegakan hukum terhadap peredaran Narkotika oleh kelompok kejahatan terorganisir. Beberapa aspek penting dalam konvensi ini yang berkaitan dengan penegakan hukum Narkotika adalah:

1. Memberikan definisi yang luas tentang kejahatan terorganisir, yang mencakup berbagai kegiatan, termasuk peredaran Narkotika oleh kelompok kejahatan terorganisir untuk memberikan dasar hukum untuk penegakan terhadap kelompok kejahatan terorganisir yang terlibat dalam peredaran Narkotika;
2. Mendorong negara-negara anggota untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisir, termasuk peredaran Narkotika. Ini mencakup pertukaran informasi, ekstradisi, dan bantuan hukum lintas batas;
3. Mendorong negara-negara anggota untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan penyelidikan yang efektif terhadap kejahatan terorganisir, termasuk peredaran Narkotika. Ini melibatkan upaya untuk mengidentifikasi, menghentikan, dan mengadili anggota kelompok kejahatan terorganisir yang terlibat dalam peredaran Narkotika;
4. Mengakui pentingnya penggunaan alat teknologi, termasuk alat-alat komunikasi, dalam kejahatan terorganisir. Ini memberikan dasar hukum untuk memantau dan mengungkap aktivitas kelompok kejahatan terorganisir yang terlibat dalam peredaran Narkotika;
5. Mendorong negara-negara anggota untuk mengambil tindakan perampasan terhadap aset dan barang bukti yang terkait dengan kejahatan terorganisir, termasuk peredaran Narkotika. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi sumber daya keuangan kelompok kejahatan terorganisir;
6. Menekankan pentingnya peningkatan pelatihan dan kapasitas penegak hukum dalam menghadapi kejahatan terorganisir. Ini mencakup pengembangan keterampilan dan peningkatan kemampuan dalam investigasi Narkotika yang melibatkan kelompok kejahatan terorganisir;
7. Mengatur prinsip-prinsip yang relevan terkait dengan pengadilan dan hukuman bagi pelaku kejahatan terorganisir, termasuk peredaran Narkotika. Ini dapat mencakup pemberian hukuman yang berat kepada pelaku yang terlibat dalam peredaran Narkotika.

Protokol Palermo adalah instrumen penting dalam kerja sama internasional untuk memerangi peredaran Narkotika yang melibatkan kelompok kejahatan terorganisir. Negara yang turut menandatangani dan meratifikasi konvensi ini diharapkan untuk mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan dalam protokol ini untuk memperkuat penegakan hukum terhadap peredaran Narkotika dan kejahatan terorganisir lainnya. Sampai dengan tanggal 27 Februari 2023, Protokol Palermo ini mempunyai 191 pihak, yang mencakup 186 negara anggota PBB, Kepulauan Cook, Tahta Suci Vatikan, Niue, Negara Palestina, dan Uni Eropa.

Indonesia memang telah mengadopsi Protokol Palermo sebagai kebijakan yang telah diambil oleh Indonesia. Indonesia kemudian mengadopsi Protokol Palermo kedalam sistem hukum nasional dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun Indonesia mengkhususkan Protokol Palermo terkhusus pada kejahatan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), bukan mengenai narkotika.

Pemerintah Indonesia telah aktif dalam upaya pemberantasan Narkotika dengan memberlakukan undang-undang yang ketat dan menjatuhkan hukuman berat terhadap pelaku Narkotika, termasuk hukuman mati seperti yang dilakukan terhadap Freddy Budiman. Selain itu, berbagai program pencegahan, rehabilitasi, dan kesadaran juga telah dilakukan untuk mengatasi masalah Narkoba. Namun, peredaran Narkotika tetap menjadi masalah serius, terutama karena Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki ratusan ribu kilometer garis pantai yang sulit untuk dijaga dengan ketat. Terdapat upaya peredaran Narkotika oleh kelompok kejahatan terorganisir yang beroperasi di dalam dan luar negeri.

Kerangka peraturan perundang-undangan mengenai Narkotika telah dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Namun demikian, efektivitas ketentuan-ketentuan ini dalam memberantas tindak pidana Narkotika belum menunjukkan penurunan yang nyata. Dalam beberapa kasus baru-baru ini, sejumlah besar individu yang terlibat dalam distribusi dan penjualan Narkotika telah ditangkap dan dikenakan hukuman berat. Namun tampaknya langkah tersebut belum efektif menyurutkan semangat para pelanggar hukum lainnya, karena ada kecenderungan nyata di antara mereka untuk memperluas wilayah operasionalnya.

Penegakan hukum tindak pidana Narkotika di Indonesia saat ini memiliki ciri khas yang hanya terfokus pada penangkapan dan pengusutan pelaku fisik yang terlibat dalam peredaran Narkotika. Meskipun langkah ini penting dalam mengurangi peredaran Narkotika, pendekatan ini cenderung tidak mencakup dua aspek kunci, yakni pelaku pendanaan dan penerima hasil ekonomi dari kejahatan tersebut. Keterbatasan ini mengakibatkan penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika tidak mencapai tingkat yang tuntas. Ini berarti akar masalah peredaran Narkotika tetap tidak teratasi, dan kegiatan ilegal tersebut dapat terus berlanjut.

Evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana Narkotika di Indonesia dapat berbeda-beda tergantung pada perspektif dan indikator yang digunakan. Salah satunya adalah perspektif dan indikator yang termuat dalam konvensi Palermo. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum Narkotika di Indonesia, penting untuk fokus pada dua aspek utama: reformasi kebijakan Narkotika dan evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan yang ada serta hasil-hasilnya. Dengan demikian rekonsepsi atau evaluasi terhadap penegakan hukum terhadap peredaran Narkotika sudah menjadi suatu kebutuhan dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari upaya penegakan hukum peredaran Narkotika. Ini juga menjadi relevan ketika pada tahun 2015 Presiden Joko Widodo sudah menyatakan bahwa Indonesia saat ini sedang dilanda darurat Narkoba. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas Indonesia memerlukan perubahan dalam pendekatan penegakan hukum terhadap peredaran Narkotika.

Penelitian ini memiliki tujuan yang sangat relevan dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika. Secara sistematis, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan gagasan konseptual yang dapat mengarah pada pengembangan regulasi atau peraturan hukum yang memiliki sifat kewajiban dan mendukung aparat penegak hukum dalam mengusut pendanaan dan hasil kejahatan tindak pidana Narkotika. Pendekatan yang diusulkan dalam penelitian ini mencakup beberapa tahap penting. Pertama, adalah identifikasi permasalahan yang ada dalam penegakan hukum saat ini, yakni keterbatasan dalam menjangkau pelaku pendanaan dan penerima manfaat ekonomi dari peredaran Narkotika. Dalam konteks ini, penelitian akan melakukan analisis mendalam terhadap hambatan hukum yang menghambat penegakan hukum yang lebih komprehensif.

Kemudian, penelitian ini akan mengusulkan gagasan konseptual yang dapat merinci bagaimana regulasi atau peraturan hukum yang bersifat kewajiban akan dirancang. Gagasan ini dapat mencakup elemen-elemen seperti pemantauan transaksi keuangan, perampasan aset, dan kerja sama internasional. Hasil dari penelitian ini kemudian dapat digunakan sebagai landasan bagi pembuatan regulasi baru atau perubahan pada regulasi yang ada, dengan tujuan untuk memberikan dukungan yang jelas kepada aparat penegak hukum dalam menjangkau pelaku pendanaan dan penerima manfaat ekonomi dari tindak pidana Narkotika. Dengan demikian, penelitian ini dapat berperan penting dalam memperkuat kerangka hukum yang dibutuhkan untuk penegakan hukum yang lebih komprehensif dan tuntas dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.